

Rekomendasi BUMDes Sebagai Solusi Masalah Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Desa Hutabagasan

Yuni Mittra Simanullang¹, Tuti Atika²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Email: ¹yunimittrasimanullang@gmail.com, ²tutiatika1963@gmail.com

Abstract

The development of local community of Satahi Tani farming group in Hutabagasan Village aims to explore the problem faced and find solutions to overcome them. The method used in the devotion of the Satahi Tani peasant group is the Delbeq Method which is supported by FGD (Focus Group Discussion) tools aimed at focusing the topic of discussion. The results of the development of "satahi tani" revealed, the problem faced together is the absence of guaranteed prices of agricultural products (marketing). Of the five programs of the "Satahi tani" farming group, three of them suffered losses due to low prices of agricultural production, even though the quantity and quality of production products were good. Based on the problem, a common solution was produced, namely the recommendation of the formation of a BUMDes. The formation of BUMDes is outlined in a policy paper as an intervention from the results of FGD that has been carried out. The policy paper has been submitted to the Hutabagasan village government as a means of connecting the aspirations of "Satahi Tani". Furthermore, invite the group "Satahi Tani" to restore the production function of the group.

Keywords: Local Community Development, Satahi Tani Peasant Group, Policy Paper, Bumdes Formation, Delbeq Method.

Abstrak

Pengembangan masyarakat lokal kelompok tani Satahi Tani di Desa Hutabagasan bertujuan untuk menggalikan masalah yang dihadapi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kelompok tani Satahi Tani adalah Metode Delbeq yang didukung dengan tools FGD (Focus Group Discussion) bertujuan memfokuskan topik diskusi. Hasil pengembangan "satahi tani" mengungkapkan, masalah yang dihadapi bersama adalah tidak adanya jaminan harga hasil pertanian (pemasaran). Dari lima program kelompok tani "Satahi tani", tiga diantaranya mengalami kerugian disebabkan harga hasil produksi pertanian yang rendah, padahal kuantitas dan kualitas hasil produksi bagus. Berdasarkan masalah tersebut dihasilkan sebuah solusi bersama yaitu rekomendasi pembentukan sebuah BUMDes. Pembentukan BUMDes dituangkan dalam sebuah kertas kebijakan sebagai intervensi dari hasil FGD yang telah dilakukan. Kertas kebijakan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah desa Hutabagasan sebagai alat penyambung aspirasi "Satahi Tani". Selanjutnya mengajak kelompok "Satahi Tani" untuk mengembalikan kembali fungsi produksi kelompok tersebut.

Kata Kunci: Pengembangan Masyarakat Lokal, Kelompok tani Satahi Tani, Kertas Kebijakan, Pembentukan Bumdes, Metode Delbeq.

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu daerah sasaran pengembangan kawasan pertanian di Indonesia, karena dari jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (Publikasi BPS Tahun 2016) sebesar 182.991 jiwa, 85% diantaranya adalah hidup dari sektor pertanian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi Humbang Hasundutan selama 3 (tiga) tahun terakhir bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar secara berturut – turut adalah tahun 2013 sebesar 47,78%, tahun 2014 sebesar 46,58% dan tahun 2015 sebesar 45,78%. Selanjutnya tahun 2015 ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan tumbuh sebesar 5, 24% dari besar pertumbuhan ekonomi

tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 3,97%. Dari data di atas memang sektor pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Humbang Hasundutan, namun jika kita melihat pertumbuhan dari tiga tahun berturut – turut tersebut pertumbuhan ekonomi pertanian dari tahun ketahun semakin menurun.

Tantangan utama pembangunan pertanian Humbang Hasundutan menurut analisis Dinas Pertanian Humbang Hasundutan yaitu menurunnya kesuburan (lahan) pertanian, kerusakan infrastruktur jaringan irigasi. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan/kebanjiran. Mahalnya sarana produksi dan alat mesin pertanian. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani, kemampuan permodalan petani terbatas, impor benih horticultural terus meningkat, penerapan teknologi pertanian terbatas. Inisiatif peningkatan mutu masih rendah. Daya saing produksi hortikultura masih rendah. Hama dan penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani yaitu dengan menggerakkan pembentukan lembaga kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusahatani dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan yang bertambah, dan kehidupan lebih sejahtera. Selain itu kelompok tani juga berfungsi sebagai wahana kerjasama, baik antara sesama anggota kelompok tani atau pihak lain, sehingga usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan. Terakhir berfungsi sebagai unit produksi, yang dilaksanakan oleh masing – masing anggota kelompok tani secara keseluruhan sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas (syahyuti, 2007).

Berdasarkan fungsi dari kelompok tani tersebut penulis melakukan mini riset terhadap salah satu kelompok tani yang ada di Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul yaitu Kelompok Tani “**Satahi Tani**” untuk melihat apakah fungsi kelompok tani tersebut berjalan dan apa masalah yang mereka hadapi dalam kelompok tani tersebut. Dalam melakukan mini risetnya penulis mengajak anggota kelompok Satahi Tani berdiskusi dengan metode Focus Group Discussion (FGD) untuk mengetahui bagaimana keberfungsian kelompok tani tersebut dan apa saja kendala yang mereka hadapi dalam proses pertaniannya. Dari hasil diskusi tersebut di dapati bahwa ketiga fungsi dalam kelompok tani tersebut sudah dijalankan, dimana dalam kelompok tani tersebut mereka saling belajar, sharing dan bekerjasama dalam membahas dan menerapkan proses pertanian dalam kehidupan sehari – hari mereka. Mereka juga melakukan unit produksi beberapa kali dari hasil pertanian mereka, walaupun pada saat ini unit produksi tersebut tidak berjalan karena setelah beberapa kali mereka menghasilkan produksi pertanian mereka dengan kualitas cukup baik tetapi jaminan harga tidak ada sehingga dari beberapa kali unit produksi yang dilakukan mereka selalu rugi. Hal ini menyebabkan mereka untuk sementara waktu menstop fungsi unit produksi dalam kelompok mereka. Dari hasil diskusi tersebut juga di temukan masalah - masalah yang mereka alami antara lain yaitu masalah pemasaran (tidak adanya jaminan harga dari hasil produksi pertanian), kurangnya modal dalam proses pertanian, kurangnya inisiatif dari kelompok tani satahi tani untuk melakukan suatu tindakan dalam mencari modal dan kurangnya dukungan baik dukungan pemerintah maupun keluarga. Namun dari beberapa masalah tersebut yang menjadi masalah utama yang di alami oleh kelompok tani Satahi Tani tersebut yaitu *masalah pemasaran (tidak adanya jaminan harga produksi pertanian)*, sehingga mereka sering terjebak dengan harga jual hasil produksi yang relatif rendah. Dibuktikan dari pengalaman kelompok tani Satahi Tani yang beberapa kali mengalami kerugian dari produksi hasil tani mereka yang disebabkan harga yang anjlok padahal kualitas produksi pertanian mereka bagus. Hal ini menyebabkan mereka menjadi takut / trauma untuk memulai melakukan proses pertanian kembali. Dalam hal ini dibutuhkan peran dari pemerintah setempat untuk mengurangi atau mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat terkait jaminan harga. Jika masyarakat bisa mendapatkan jaminan harga maka mereka akan lebih giat lagi dan semangat dalam bertani untuk mendapatkan produksi pertanian yang berkualitas.

Dari hasil FGD tersebut disepakati intervensi yang dilakukan yaitu penyerahakan kertas kebijakan kepada pemerintah desa Hutabagasan. The LGI/ Urban Institute mendefinisikan Kertas kebijakan sebagai instrumen komunikasi yang didorong oleh nilai, berorientasi pada masalah, yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan. Kertas kebijakan tersebut sebagai alat komunikasi kelompok tani Satahi Tani kepada pemerintah Desa Hutabagasan yang berisi masalah yang mereka alami dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam menjamin harga hasil produksi petani perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menampung hasil produksi pertanian masyarakat setempat dengan menentukan kesepakatan harga terendah dan harga tertinggi dengan catatan kualitas produksi pertanian bagus dan

terjamin. BUMDes inilah yang berperan untuk memasarkan hasil produksi pertanian yang ditampung tadi dengan membangun relasi kepada investor atau perusahaan yang ada diluar kabupaten Humbang Hasundutan yang bisa menampung hasil pertanian tersebut. Selain berdampak kepada masyarakat badan usaha tersebut juga berdampak kepada desa sebagai penambahan pemasukan pendapatan desa.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Dalam melakukan intervensi mezzo, Rothman dan Tropman (dalam Adil 2013) membagi tiga model intervensi komunitas yaitu model A (Pengembangan Masyarakat Lokal), model B (Perencanaan Sosial) dan model C (Aksi Sosial). Disini praktikan menggunakan Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal/ Community Development) yang merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Tahapan yang digunakan yaitu tahapan secara umum (general) menurut Zastrow yaitu persiapan, assessment, perencanaan program, intervensi, evaluasi program dan terminasi.

1. Tahap Persiapan

Menurut penelitian Sunaringtyas, Asikin dan Junaedin (2017) tahap persiapan merupakan tahap dimana mahasiswa mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Dalam tahap persiapan ini terdapat dua persiapan yaitu persiapan praktikan dan persiapan lapangan:

- a. Persiapan praktikan yaitu praktikan menggali informasi terkait kondisi dan masalah – masalah yang dihadapi oleh kelompok tani Satahi Tani.
- b. Persiapan lapangan yaitu praktikan menjalin komunikasi dengan pengurus/BPH kelompok tani Satahi Tani dan menyepakati kapan dan dimana tempat diskusi FGD yang akan dilaksanakan. Disepakati diskusi FGD dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, di rumah bendahara kelompok tani Satahi Tani.

2. Tahap Assesment

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah lebih lanjut dan lebih dalam (kebutuhan yang dirasakan) ataupun kebutuhan yang dieksplor dan juga sistem sumber yang dimiliki komunitas sasaran serta sistem sumber yang dimiliki oleh praktikan. Dalam melakukan assessment ini praktikan menggunakan metode Delbecq yaitu menetapkan prioritas masalah yang dilakukan melalui kesepakatan sekelompok orang yang sama keahliannya, yang didukung dengan tools FGD (Focus Group Discussion) untuk memfokuskan jalannya diskusi dalam membahas masalah yang dihadapi kelompok tani Satahi tani yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021. Metodel delbecq dengan tools FGD yang dilakukan fokus membahas program program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan kelompok tani Satahi tani, kendala/ masalah yang mereka hadapi saat ini dan apa solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam melakukan diskusi FGD ini praktikan berperan sebagai fasilitator, dimana praktikan memberikan pertanyaan, mendengar tanggapan dari setiap peserta dan menulis kesepakatan yang disepakati oleh seluruh peserta diskusi.



Gambar 1: Kegiatan diskusi dalam tahap assessment dengan Kelompok tani Satahi Tani

Dari hasil FGD didapatkan bahwa ada lima program yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani Satahi tani tersebut yaitu penanaman jagung, penanaman sayur kol, penanam kentang, penanam bawang merah dan penanam padi gogo. Dari kelima program tersebut tiga program diantaranya mengalami kerugian yaitu program penanaman sayur kol, kentang dan jagung yang disebabkan oleh harga hasil produksi yang rendah namun kualitas produksi cukup bagus. Sedangkan dua program lainnya cukup menguntungkan dan satu diantaranya yaitu program padi gogo merupakan program dari Pemkab dari Dinas Pertanian. Untuk program akan dilaksanakan tidak ada karena mereka memilih untuk bertani secara individu dulu dan hal itu juga disebabkan karena mereka telah mengalami beberapa kali kerugian. Ada beberapa masah yang mereka alami yaitu masalah pemasaran hasil produksi, permodalan, harga pupuk yang cukup mahal, dan kurangnya inisiatif kelompok. Dari beberapa masalah tersebut kami mencoba mengali apa sebenarnya masalah utama dari kelompok tersebut. Setelah berdiskusi kembali di dapati yang menjadi **masalah utamanya yaitu masalah pemasaran hasil produksi pertanian (tidak adanya jaminan harga pertanian)**. Seperti penjelasan dari salah satu anggota kelompok tersebut jika sudah ada tempat pemasaran yang jelas dan ada jaminan harga hasil pertanian, mereka akan lebih semangat lagi dan mau meminjam modal untuk melakukan program pertanian lagi dengan harga jaminan serta kualitas hasil produksi yang sudah disepakati sehingga mereka tidak mengalami kerugian lagi.

3. Tahap Perencanaan Program.

Tahapan untuk membuat suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan partisipasi dari anggota kelompok masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi masalah. Menurut Chanbers (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai – nilai sosial. Dari hasil FGD tersebut di dapati bahwa masalah yang dihadapi kelompok tani Satahi Tani tersebut mengenai kondisi perekonomian dimana masyarakat membutuhkan tempat pemasaran dengan jaminan harga yang baik. Jika mereka nanti bisa mendapatkannya maka mereka akan semangat dan termotivasi untuk melakukan program – program yang baru. Seperti yang di katakan dalam teori motivasi ekspektasi yang dikemukakan oleh Vroom bahwa orang – orang akan termotivasi untuk melakukan hal – hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut (koonz, 1990: 123). Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan dan dukungan dari teori – teori diatas maka ada dua rencana program yang dibuat yaitu

1. Pembuatan dan pemberian kertas kebijakan kepada pemerintah desa Hutabagasan tentang rekomendasi pembentukan BUMDes sebagai tempat penampung hasil produksi pertanian masyarakat dengan membuat kesepakatan harga terendah dan tertingginya. Tujuan program ini yaitu untuk menyampaikan kepada pemerintah desa Hutabagasan masalah yang dihadapi kelompok tani Satahi Tani serta memberikan rekomendasi solusi untuk masalah tersebut, dengan harapan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah.
2. Memotivasi dan mengajak kelompok tani Satahi Tani untuk aktif kembali melakukan program bersama dengan melihat tanaman membutuhkan modal yang minim dan dapat mendapat keuntungan. Tujuannya untuk mengaktifkan kembali fungsi kelompok tani Satahi Tani sebagai kelompok tani yang menghasilkan produksi kembali untuk mendukung kesejahteraan anggota kelompok tersebut.

Rencana berikutnya, praktikan akan membuat kertas kebijakannya selama 3 minggu (karena praktikan sibuk di tempat PKL). Setelah itu, nantinya praktikan akan melakukan pertemuan diskusi kembali dengan anggota kelompok tani tersebut. Dalam pertemuan diskusi tersebut akan membahas 2 topik yaitu pembahasan kertas kebijakan yang telah dibuat dan diskusi terkait program bersama apa yang bisa dilakukan kembali oleh kelompok tani Satahi Tani tersebut. Kemudian ketika nantinya kertas kebijakan tersebut telah disepakati maka praktikan akan segera memberikannya kepada pemerintah desa Hutabagasan.

4. Tahap Intervensi

Dalam tahap ini praktikan melaksanakan intervensi program yang telah direncanakan. Pendekatan yang digunakan praktikan dalam melaksanakan intervensi ini yaitu pendekatan non direktif, dimana community worker berusaha untuk merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan arah langkah sendiri dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (Batten, 1967: 11). Dalam melakukan intervensi ini, praktikan mengumpulkan kembali kelompok tani Satahi Tani pada hari Minggu, 28 November 2021. Dalam pertemuan ini praktikan menentukan dua topik bahasan diskusi yaitu

1. Diskusi mengenai kertas kebijakan yang telah dibuat praktikan, apakah masih ada yang mau diperbaiki dan ditambahi, setelah selesai diskusi didapati kesepakatan kertas kebijakan tersebut.
2. Diskusi terkait pembahasan program kerja bersama yang bisa dilakukan oleh kelompok tani Satahi Tani. Setelah dilakukan diskusi didapatkan keputusan bahwa kelompok Satahi Tani akan melakukan program bersama kembali yaitu penanaman jagung dengan luas lahan 2 hektar pada tahun 2022 mendatang yang di tanam di lahan salah satu anggota kelompok tani tersebut.



Gambar 2: Kegiatan Diskusi menyepakati isi kertas kebijakan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Desa Hutabagasan

Pada hari Rabu, 1 Desember 2021 praktikan menyerahkan kertas kebijakan tersebut kepada pemerintah Desa Hutabagasan yang diterima oleh Sekretaris desa dan seluruh perangkat Desa Hutabagasan, berhubung kepala desa Hutabagasan sedang berada diluar kota. Dalam penyerahan kertas kebijakan tersebut praktikan menyampaikan latar belakang dan tujuan praktikan dalam membuat kertas kebijakan tersebut. Mereka menyambut hangat praktikan mengajak berdiskusi. Setelah diskusi didapatkan kesimpulan bahwa **Pemerintah Desa Hutabagasan akan membentuk BUMDes tahun 2022 dan akan memperhatikan saran dari praktikan yaitu membentuk BUMDes penampung hasil pertanian masyarakat.** Praktikan sangat mengharapkan realisasi dari kertas kebijakan tersebut dan realisasi program bersama yang akan dilaksanakan oleh kelompok tani Satahi tani.

5. Tahap Evaluasi

Dalam tahap ini praktikan menggunakan model evaluasi Sumatif yang dikemukakan oleh Michael Scriven, evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian program. Dari hasil intervensi didapati bahwa program yang telah rencanakan berhasil dimana kedua program tersebut dapat tercapai. Dimana kertas kebijakan yang telah dibuat sudah diberikan kepada pemerintah desa Hutabagasan dan kelompok tani tersebut akan kembali lagi melaksanakan program kerja bersama di tahun 2022. Semoga dengan diberikannya kertas kebijakan tersebut pemerintah dapat menepati janjinya untuk membentuk BUMDes penampung hasil pertanian masyarakat di Desa Hutabagasan dan program yang akan dilaksanakan kelompok tani tersebut dapat terlaksanakan dan mendapatkan keuntungan.

6. Tahap Terminasi

Dalam tahapan ini praktikan mengakhiri mini proyek yang dilaksanakan karena batas waktu praktikan dalam PKL telah habis, namun walaupun berakhir praktikan sangat mengharapkan perhatian dari pada kelompok Satahi Tani dan masyarakat setempat terkait Janji pembentukan BUMDes di Desa Hutabagasan dan juga praktikan sangat mengharapkan realisasi dari program kerja bersama kelompok Satahi Tani.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan tahapan Group Work menurut Zastrow dalam pengabdian ini di dapati bahwa masalah utama yang dihadapi oleh kelompok tani Satahi Tani adalah **masalah pemasaran hasil produksi pertanian (tidak adanya jaminan harga pertanian)** yang menyebabkan mereka takut untuk melakukan program penanaman kembali. Berdasarkan masalah tersebut dilakukan intervensi yaitu pemberian kertas Kebijakan kepada pemerintah Desa Hutabagasan yang berisi tentang masalah yang dihadapi kelompok tani Satahi Tani dan Solusi yang ditawarkan. Berikut *Rekomendasi kertas kebijakan* yang dibuat:

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu peran penting dalam pembangunan nasional berkelanjutan dan demi terwujudnya kedaulatan pangan. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani pemerintah melakukan upaya – upaya yaitu Pertama, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hutabagasan sebagai lembaga penampung hasil produksi pertanian masyarakat supaya setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Dalam mencapai harga yang netral diharapkan pengurus BUMDesa dalam menjalin relasi dengan perusahaan atau investor yang dapat menampung hasil produksi pertanian masyarakat dengan catatan kualitas produksi pertanian bagus. Kedua jika pemerintah Desa Hutabagasan kurang dalam modal pembentukan BUMDes, maka Pemerintah Hutabagasan dapat bekerja sama dengan Desa – Desa sekitar untuk membentuk BUMDes Kerjasama antar desa untuk menampung produksi pertanian masyarakat karena masalah terkait pemasaran (jaminan harga produksi) merupakan masalah nasional yang secara umum dialami oleh hampir seluruh petani.

Kemudian dilakukan diskusi untuk mengaktifkan kembali fungsi produksi kelompok tani Satahi Tani. Setelah dilakukan diskusi didapatkan keputusan bahwa kelompok Satahi Tani akan melakukan program bersama kembali yaitu penanaman jagung dengan luas lahan 2 hektar pada tahun 2022 mendatang yang di tanam di lahan salah satu anggota kelompok tani tersebut.



Gambar 3: Penyerahan kertas kebijakan kepada pemerintah desa Hutabagasan

Kertas kebijakan tersebut diserahkan kepada pemerintah Desa Hutabagasan yang diterima oleh Sekretaris desa dan seluruh perangkat Desa Hutabagasan, berhubung kepala desa Hutabagasan sedang berada diluar kota. Dalam penyerahan kertas kebijakan tersebut praktikan menyampaikan latar belakang dan tujuan praktikan dalam membuat kertas kebijakan tersebut. Mereka menyambut hangat praktikan mengajak berdiskusi. Setelah diskusi didapatkan kesimpulan bahwa **Pemerintah Desa Hutabagasan akan membentuk BUMDes tahun 2022 dan akan memperhatikan saran dari praktikan yaitu membentuk BUMDes penampung hasil pertanian masyarakat.** Praktikan sangat mengharapkan realisasi dari kertas kebijakan tersebut dan realisasi program bersama yang akan dilaksanakan oleh kelompok tani Satahi tani.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil intervensi pengabdian kelompok tani Satahi Tani tersebut disimpulkan bahwa:

- Kertas kebijakan rekomendasi pembentukan BUMDes sebagai tempat penampung hasil pertanian sudah diserahkan kepada pemerintah desa Hutabagasan dan mereka menerima dan berjanji akan membentuk BUMDes tahun 2022.
- Kelompok tani Satahi Tani akan kembali melakukan program bersama pada bulan Januari 2022 yaitu program penanaman jagung seluas 2 hektar dilahan salah satu anggota kelompok tani tersebut.

Saran

Diharapkan dengan diberikannya kertas kebijakan tersebut pemerintah Desa Hutabasan dan menepati janjinya dalam membentuk BUMDes dan juga Kelompok tani Satahi Tani dapat melakukan kembali program bersama pada bulan januari mendatang. Serta kepada seluruh masyarakat supaya memperhatikan janji yang telah diberikan oleh Pemerintah desa Hutabagasan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada dosen supervisor ibu Dra Tuti Atika, MSP dan bapak Fajar Utama Ritonga, S.Sos, M.Kesos dosen pengampu mata kuliah praktikum 2 ini yang membimbing dalam proses PKL 2 ini. Terima kasih juga kepada kelompok tani Satahi Tani yang mau menerima saya dalam proses pengabdian ini dan terima kasih juga kepada pemerintah Desa Hutabagasan yang sudah menerima kerta kebijakan yang telah kami buat kiranya apa yang dijanjikan dapat dilaksanakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, 2013, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*, Ed.1, Rajawali Pers, Jakarta.

Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Ridlwani, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengembangan perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8, no.3, hal.424-440. Diakses melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/314/273> pada 10 januari 2018

Kusuma Dewi, (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal of Rural and Development*. Vol.V, no.1, hal.1-14. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/viewFile/914/878>

Elita, Lia. (2020). “Mampukah Pertanian Modern Jadi Solusi Bagi Petani Indonesia?”, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/104/mampukah-pertanian-modern%20jadi-solusi-bagi-petani-indonesia-2/>

KH Hasundutan, Tantangan Utama Pembangunan Pertanian Humbang Hasundutan. Renstra 2016- 2021: <http://humbanghasundutankab.go.id>

<https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html>

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa